

**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB KURATOR TERHADAP HARTA BENDA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**

Oleh

**NUR FATIMATUS SUFRAH**

**1800874201135**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2021**



**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB KURATOR TERHADAP HARTA BENDA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**NUR FATIMATUS SUFRAH**

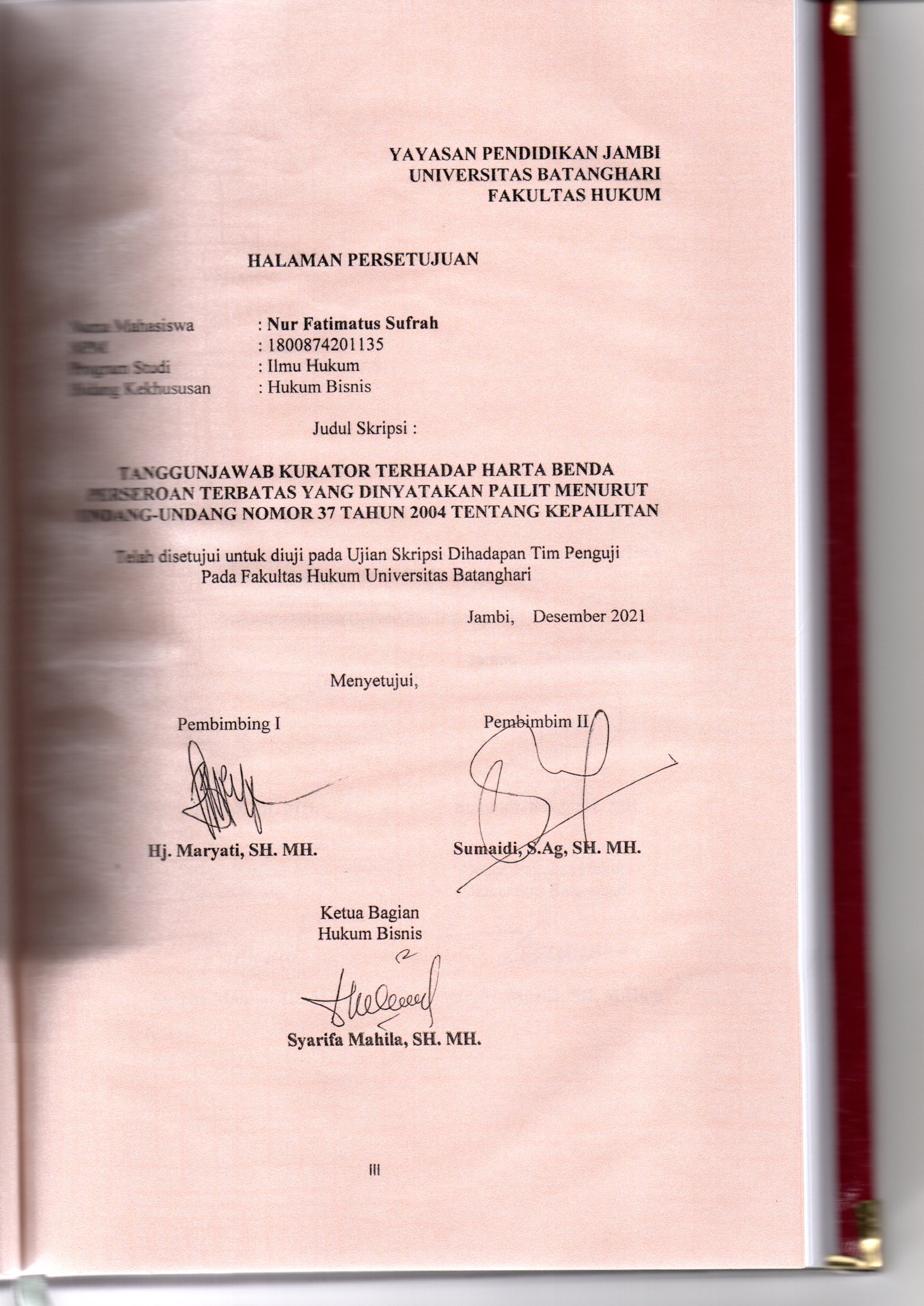
**1800874201135**

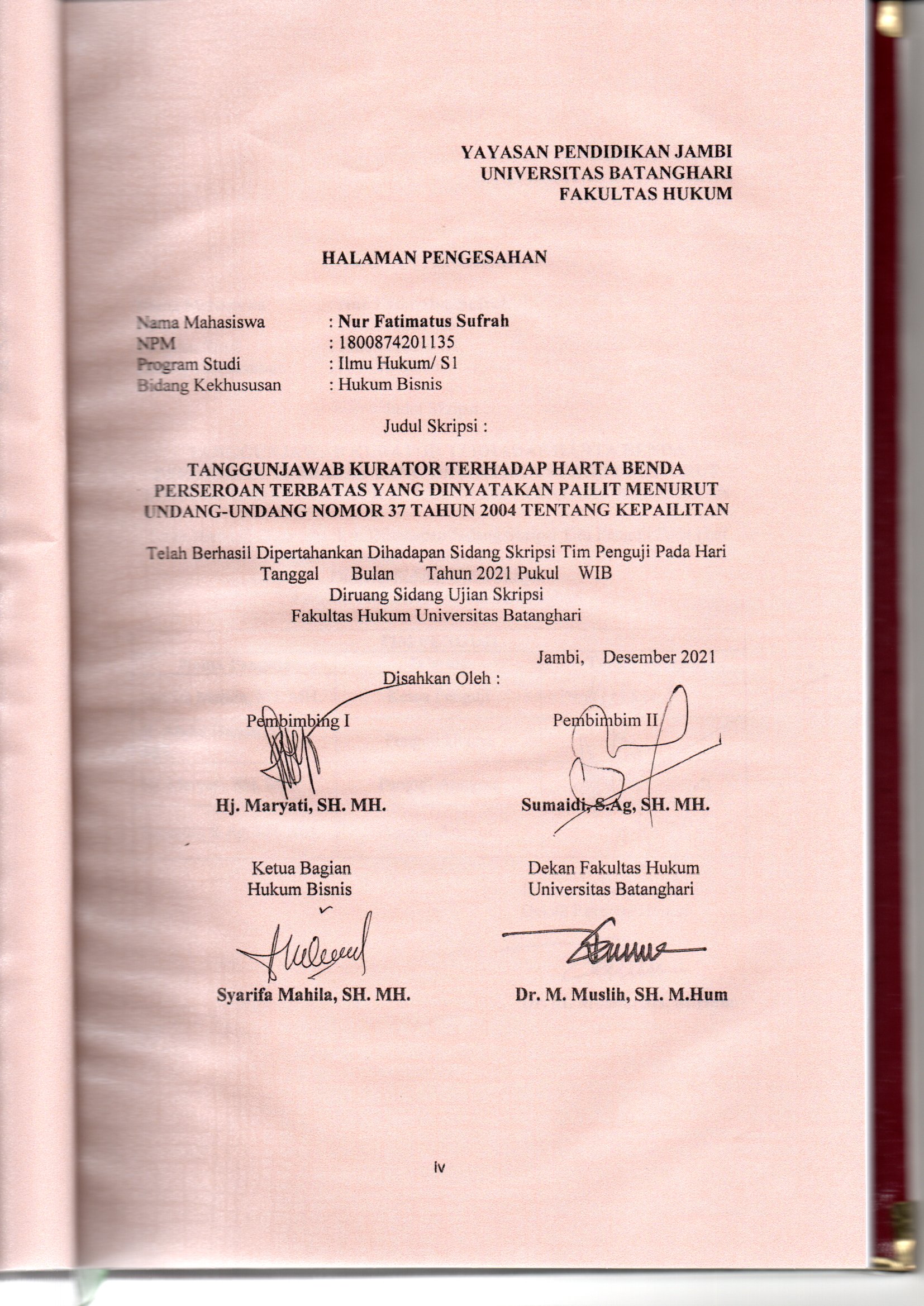
**FAKULTAS HUKUM**

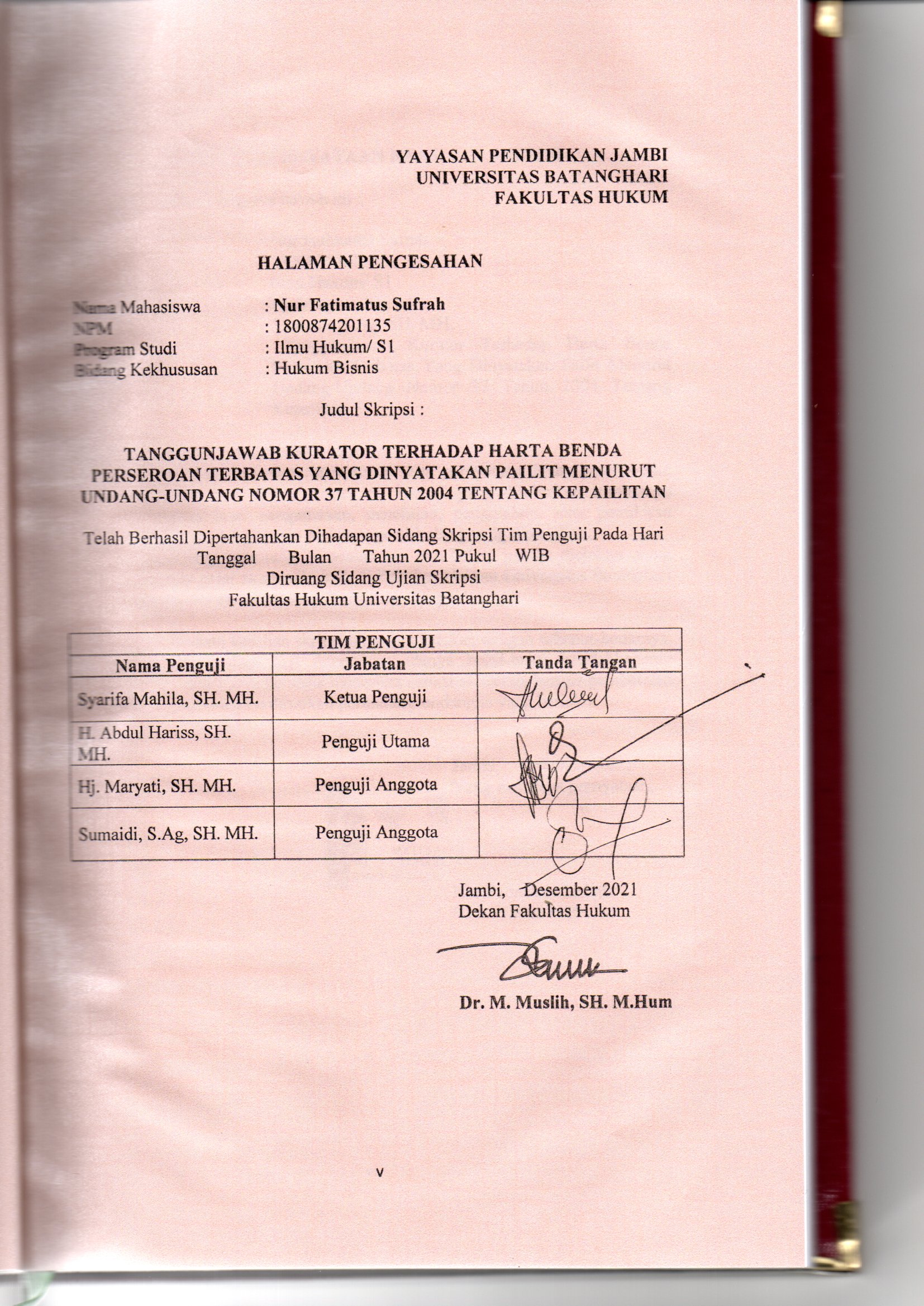
**UNIVERSITAS BATANGHARI**

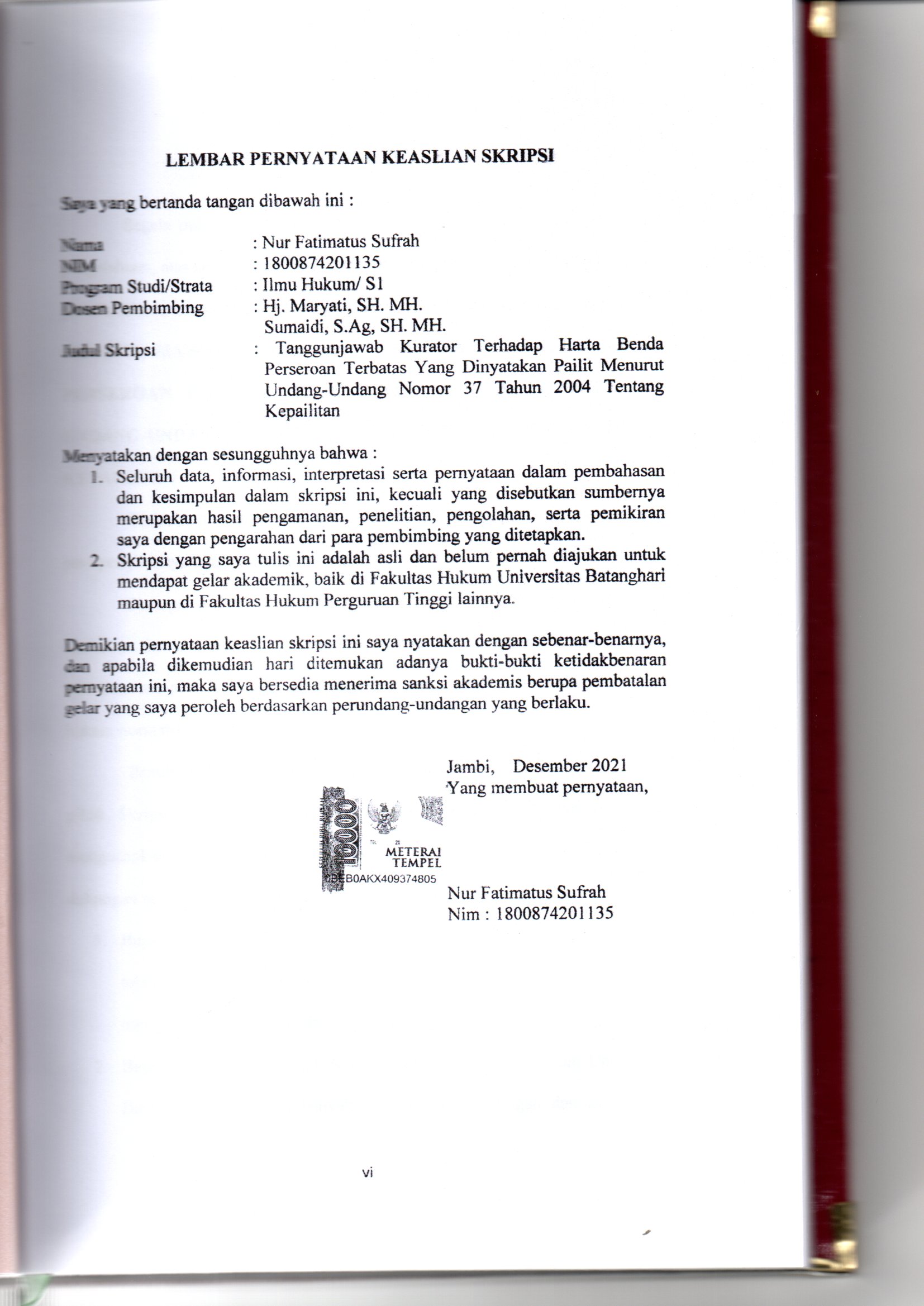
**JAMBI**

**2021**









**KATA PENGANTAR**

Segala puji hanyala bagi Allah SWT, sumber segala hikmah dan ilmu pengetahuan, atas segala karunia dan rahmat Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“****TANGGUNJAWAB KURATOR TERHADAP HARTA BENDA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN ”.**

Shalawat dan salam bagi RasulNya, Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya, mengenai Tanggungjawab Kurator. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh sumber informasi melalui penelitian hukum normatif.

Penulis sadar bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam penyusunan Skripsi ini, antara lain:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH. MH., Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada fakultas hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. MHum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
4. Bapak H. Muhamad Badri, SH. MH. Pembimbing Akademik. yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada kami.
5. Ibu Hj. Maryati, SH. MH. Pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH. MH., Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan Ibu para Dosen serta seluruh Staf tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
8. Kepada Ayahanda tercinta Muhammad Fakir dan Ibunda Nuraini, serta Kakaku yang tersayang Habib Bowo, Solihin, Abdul Malik dan Fauji Rohim. Yang senantiasa mendo’akan, yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkah penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan Skirpsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itulah kami harapkan kritik yang membangun demi penyempurnaan Skripsi ini .

Jambi, Desember 2021

Penulis

**NUR FATIMATUS SUFRAH**

**1800874201135**

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PENGESAHAN ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI iv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Landasan Teori 9

F. Metodologi Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 13

**BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA BENDA DAN**

**PAILIT. 15**

A. Ketentuan Umum Tentang Harta Benda 15

B. Ketentuan Umum Tentang Kepailitan 23

**BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KURATOR 44**

A. Pengertian Kurator 44

B. Syarat Kurator 47

C. Tugas Kurator 52

D. Tanggungjawab Kurator 53

**BAB IV TANGGUNGJAWAB KURATOR TERHADAP HARTA BENDA PERSEROAN TERBATAS PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG**

**KEPAILITAN 63**

1. Bagaimana Pengaturan Secara Normatif Tanggungjawab Kurator Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan 63
2. Apa yang menjadi Kelemahan seorang kurator dalam Pengurusan / Pemberesan terhadap harta benda perseroan terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitian 71

**BAB V PENUTUP 79**

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

**DAFTAF PUSATAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Menjalankan bisnis dimasa pandemi seperti ini sudah dipastikan sebuah perusahaan tidak keluar dari permasalahan yang kompleks. Kegiatan usaha yang mengalami kebangkrutan atau dipailitkan oleh pengadilan niaga dapat berpengaruh buruk tidak hanya kepada perusahaan itu saja tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat.

Disisi lain juga yang sering terjadi di pengadilan niaga bahwa badan usaha memperlihatkan kebanyakan yang dimohonkan pailit adalah perseroan terbatas. Sangat mengganggu sekali dalam meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya karena tidak ada kemampuannya, dan sulitnya untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Terlebih dampak yang ditimbulkan oleh pendemi Covid 19 ini kita lihat bahwa sangat besar pengaruh bila mana ketika seorang yang mempunyai usaha akan sulit untuk membayar hutangnya itu. Dengan keadan seperti ini yang sangat sulit untuk dibaca, dan ketika persoalan ini tidak seleai maka akan sangat berpengaruh luas lagi.

Sehingga kita melihat kepada kepentingan debitor selaku pengusaha yang melakukan usaha, maupun kepentingan kreditor dengan adil. Maka dari itu kebutuhan yang sangat membantu dalam setiap kepailitan adalah lembaga kepailitan sehingga untuk menjalankan bisnis perlu yang dinamakan penjatuhan kepailitan. Dengan sangat tegas yang terdapat didalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 1998 memberi syarat bahwa ada harus ada 2 kreditur sehingga bisa dinyatakan pailit. Sesuai dengan makna filosofis yaitu tujuan dari kepailitan adalah cara mendistribusian aset dengan tujuan membuat keseimbangan kepada semua kreditur kaitannya dengan tidak membayarnya debitor dikarenakan dalam menjalankan tanggungjawabnya membayar ternyata tidak mampu. Pada suatu kepailitan tidak adanya satu kreditor malainkan harus lebih dari satu baru bisa dikatakan pailit. Maka kekayaan yang dimiliki seorang debitor dengan mudah seorang kreditor memperebutkan harta debitor untuk melunasi hutangnya.

Padar tahun 1998 pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas undang-undang Kepailitan (lembaga Negara tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135). Dalam berjalanya waktu setelah lebih dari lima tahun Undang-undang Kepailitan 1998 tersebut berlaku dirasakan banyak kekuarangan dan kelemahan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan sedikit didalam peraturan tersebut.

Bagaimana upaya agar kelamahan dan juga masih banyak kekurangan yang terdapat dalam perundangan yang lama, sehingga ketika itu dikeluarkan undang undang kepailita yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang terdapat pengertian dari pasal tersebut bahwa kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak mampu membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Di dalam Undang-undang Kepailitan yang terdapat dalam pasal 24 angka 1 dikatakan “terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum dan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”. Dihapusnya kewenangan untuk menguasi hartanya, maka harta kekayaan seorang debitur dilarang memanfaatkan dari harta pailit, disebabkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga yang menyatakan pailit, maka jatuhlah sita umum terhadap semua harta benda baik itu saat pailit atau saat mendapatkannya dalam keadaan pailiti.

Harta yang didapat saat dalam keadaan pailit juga termasuk harta yang tidak boleh di lakukan tindakan apapun, harta benda disini menurut kamus besar Indoneisa yaitu barang yang berupa benda yang tetap ataupun bergerak, sebagai berikut:

1. semua yang Nampak seperti kayu, air ataupun besi.
2. Barang yang bernilai
3. Benda ataupun yang bersifat bisa dimanfaatkan.

Dan Harta menurut kamus besar bahasa Indonesia,

1. Barang yang hidup atau tidak hidup ataupun yang lainnya yang bisa menjadi harta kekayaan.
2. Benda yang menurut kacamata hukum sebagai kekayaan baik itu yang Nampak atau tidak.

Pada KUHPerdata yang sesuai di dalam Pasal 1131, adalah : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” **Harta itu sendiri meliputi semua barang atau harta yang Nampak ataupun yang tidak Nampak.**

Sedangkan Benda menurut pemahaman ilmu hukum ketika persepsi ini dilihat dalam arti luas maupun sempit, maka jika dilihat secara arti sempit mencakup semua yang terlihat, akan tetapi jika dalam arti luas maka dibaca siapa saja yang menjadi objek dalam kacamata hukum. Benda itu jika diartikan maka barang yang sudah menjadi hak milik seseorang.

Boedel Pailit sama juga dengan harta yang dipailitkan dari seorang ataupun organisasi. Sehingga ketika harta pailit itu di pedang oleh Balai Harta Peninggalan, maka kurator bertanggungjawab untuk membereskan harta tersebut yang di awasi oleh Hakim Pengawas. Kurator dapat membereskan harta pailit itu ketika debitur memang tidak bisa membayar hutangnya. Maka jatuh sita umum terhadap harta pailit tersebut, sehingga peran disini jatuh kepada kurator yang harus mengurusi harta pailit ini, berdasarkan undang-undang kepailitan yang diawasi langsung oleh hakim pengawas dan pengadilan Niaga ketika menjatuhkan kepailitan terhadap debitor. Pasal 69 bahwa tugas seorang kurator adalah mengurusi dan membereskan harta yang dipailitkan.

Peran kurator sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan, tujuannya harta yang telah pailit itu diamankan oleh seorang kurator. Kurator bertindak atas perintah untuk menyegel melalui pengadilan niaga serta selalu di lihat atau diperthatikan oleh hakim pengawas. Sesuai pasal 99 Undang-undang Kepailitan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh juru sita dengan membawa 2 saksi dari salah satu yaitu mewakili pemerintah daerah.

Melihat rintangan bergitu sulit untuk seorang kurator mempertanggungjawabankan dalam mengurusi dan memberesi harta yang dipailitkan, ternyata bukan sekedear untuk bisa membayar hutang ke kreditor akan tetapi jika bisa harta pailit itu bisa meningkat nilainya. Hal ini menuntut kurator bekerja secara cerdas dengan penuh strategi. Ada kelemahan kurator sehingga hal ini bisa terjadi ketika kurator lalai atau salah dalam melakukan penghitungan aset perusahaan. Ada banyak hambatan dalam menjalankan tugas sebagai kurator ketika seorang debitor tidak memperdulikan apa yang telah diputusan pengadilan dan berusaha untuk menghindar saat ingin dieksekusi.

Soal kewenangan kurator ketika menjalankan tugasnya dalam mengurusi dan membereskan harta pailit, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap harta benda perseoran terbatas yang mengalami pailit. Terutama untuk menjaga nilai harta pailit sehingga tidak berkurangan nilainya, tetapi dengan segala kewanangannya kurator terdapat kelemahan secara tidak langsung terhadap kurator yang menangani pemberesan harta pailit, dan hal tersebut dapat menyebabkan kurator tidak bekerja secara maksimal karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dan bisa dimungkinkan kurator akan melakukan penyelewengan, dan akibatnya untuk melunasi utang kepada kreditur itu kurang karena nilai harta pailit itu berkurang yang disebabkan oleh kurator. Dan kreditor sangat dirugikan dalam hal ini, karena keinginannya untuk mendapatkan haknya kembali tidak ada.

Maka dari itu kami tertarik untuk meneliti ini karena kami melihat peraturan dalam undang undang kepailitan ini sangat minim untuk bagiaman seorang kurator mendapatkan perlindungan hukum ketika berdahapan dengan masalah hukum, sehingga dalam mebereskan harta pailit banyak sekali kesulitan yang nampak. Untuk itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui seorang kurator dalam mengurusi harta pailit sehingga pihak antara debitor dan kreditor mendapatkan keadilan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Tanggunjawab Kurator Terhadap Harta Benda Perseroan Terbatas Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”.**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka kita dapat mengemukakan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Secara Normatif Tanggungjawab Kurator Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan ?
2. Apa yang menjadi Kelemahan seorang kurator dalam Pengurusan / Pemberesan terhadap harta benda perseroan terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitian ?
3. **Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan**
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui secara pengaturan Normatif Terhadap Tanggungjawab seorang kurator untuk mengurusi dan memberesi harta benda perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan kurator dalam melakukan Pengurusan / Pemberesan harta benda perseroan terbatas yang dinyatakan paliti.
3. **Tujuan Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian Skripsi ini adalah

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu hukum bisnis pada umumnya, dan pada bidang khususnya tanggungjawab kurator.
3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum bisnis, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.
4. **Kerangka Konseptual**
5. **Tanggungjawab** adalah suatu kewajiban seseorang untuk menanggung atas tindakan yang sudah menimbulkan akibat hukum.[[1]](#footnote-1)
6. **Kurator** adalah pengurus harta benda seseorang yang mengalami kepailitan.[[2]](#footnote-2)
7. **Harta Benda** adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. [[3]](#footnote-3)
8. **Perseroan Terbatas** adalah perserikatan dagang terbatas ; hal ini diatur di dalam KUH-Dagang, pasal 36, 44, yaitu : (36) berdasarkan tujuan dari perusahaan tersebut dengan mengambil nama dari persekutuan itu..[[4]](#footnote-4)
9. **Pailit** adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya.[[5]](#footnote-5)
10. **Landasan Teori**
11. **Teori Tanggungjawab**

Teori tanggung jawab hukum segala sesuatunya menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum maupun pelaku dimana pelaku tersebut sudah melakukan tindakan melawan hukum atau pidana dan wajib untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya itu, dalam bahasa Indonesia bahwa tanggunggungjawab itu wajib menanggung atau memikulnya.

Siap untuk menanggung artinya siap untuk memilkul resiko, menjamin, menerima segala sesuatu sebagai resiko yang harus dilakukan, Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai berikut :

* 1. Bertanggungjawab secara pribadi atas penyelewangan yang dilakukannya sendiri.
  2. Bertanggungjawab dimana seseorang atau orang lain yang melakukan kesalahan.
  3. Bertanggungjawab akibat dari individu atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja untuk merugikan orang lain.
  4. Bertanggungjawab karena suatu kesalahan yang tidak disengaja atau diluar kemampuannya.

Prinsip pertanggungjawaban hukum setidaknya dapat dibagui menjadi 2 macam sebagai berikut :

1. Liabibelity based on fault, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. Strict liability (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. 15 Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, undang undang jabatan notaris.
3. **Metodologi Penelitian**
4. **Tipe Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini secara “*yuridis normative”*. Penelitian secara normatif ini menjelaskan suatu proses penelitian berdasarkan aturan hukum, prinsi hukum ataupun doktrin untuk menjawab masalah hukum. penelitian secara normatif tujuannya untuk menyelesaikan masalah secara argumentasi di setiap masalah yang dihadapi.[[6]](#footnote-6) Pendekatan normatif ini karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang di lakukan untuk penunjang penulis sehingga memberi penjelasan dengan cara yang spesifik, untuk itu butuh data yang tepat untuk lebih jauh memahami tanggungjawab kurator terhadap harta benda perseroan terbatas.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian ini selalu berbicara tentang isu yang ada di dalam sistem hukum untuk memberikan “*justifikasi*” preskriptif untuk melihat suatu peristiwa hukum tersebut. Dan bisa menjadi penelitian hukum normatif sebagai suatu dasar dan sebagai pusat kajian. Sistem norma adalah sebuah sistem kaidah atau aturan yang dibuat untuk menghasilkan suatu produk hukum yang baik.

1. **Sumber Data**

Dalam pengkajian hukum normatif penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan menggabungkan dari ketiga bahan tersebu, yaitu memakai studi dokumenter.

* + - 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, undang undang kepailitan dan undang undang perseroan terbatas.

* + - 1. Bahan hukum Sekunder

Bahan dari studi kepustakaan yang mencakup bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya (hasil dari kalangan hukum) yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan untuk menganalisis dan mengerti disetiap bahan mengenai buku yang berkaitan dengan tanggungjawab kurator.

* + - 1. Bahan hukum tersier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus Bahasa Indonesia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data untuk penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen yang dikatakan sebagai studi kepustakaan, dan dikumpulkan semua bahan yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti.

1. **Analisa Data**

Analisis yang dipakai untuk penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang menitik beratkan hukum untuk dasar bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan yaitu mengenai asas norma, kaidah dari sebuah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), yang mana dalam penelitian penulis akan mediskripsikan mengenai tanggungjawab kurator berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepailitan. Sehingga diharapkan dapat menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang berada dirumusan masalah.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematikan penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang tanggungjawab kurator, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Bab I Pendahuluan Dalam Bab I penulis mencoba memberi gambaran sedikit tentang hal-hal yang barhubungan dengan skripsi ini, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sitematika. Bab II Menceritakan ketentuan umum tentang harta benda, pailit dan Pengaturannya. Bab III Menceritakan ketentuan Umum dalam tanggung jawab kurator, pengertian kurator, kapan dan syarat, dan pengaturan. Bab IV Tanggungjawab Kurator Terhadap Harta Benda Perseroan Terbatas Yang dinyatakan Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Dalam Bab IV ini membahas mengenai Bagaimana Pengaturan Secara Normatif Terhadap Tanggungjawab Kurator Dalam Pasal Kewenangan dan HAK, Apa yang menjadi Kelemahan Pengurusan / Pemberesan Kurator. Bab V Penutup Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan bedasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diajukan kepada para pihak yang terkait.

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA BENDA**

**DAN KEPAILITAN**

1. **Ketentuan Umum Tentang Harta Benda**
2. **Pengertian Harta Benda**

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang sah atau tidak melanggar peraturan perundangan maupun secara agama tidak haram. Harta yang didapat dari sebuah usaha atau pun warisan itu semua merupakan harta yang harta yang sah. Harta yang didapat dalam piutang ataupun dengan cara kredit juga merupakan harta yang sah.

Harta yang didapat dengan cara tidak sah bukan merupakan harta yang baik dan juga tidak bermanfaat bagi pemiliknya, harta juga bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap seseorang yang memilikinya maupun orang lain disekelilingnya.

Harta juga dapat melalui pertukaran pada masa lampau atau pun masa depan, maksudnya dalam masa kehidupan manusia seorang yang memiliki harta juga punya nilai sejarah ataupun histori yang membuat harta itu akan mempunyai nilai yang tinggi. Seperti benda yang bernilai akan meningkatkan harta yang dimiliki seseorang semakin bertambah.

Benda dalam arti yang luas adalah suatu yang menjadi objek lawan dari subjek hukum. dan Benda dalam arti sempit adalah tiap-tiap barang dan tiap­-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan, yang di­maksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. (Pasal 499 KUHPerdata).

Pengertian benda yang ada dalam Pasal 499 KUH Perdata menentukan bahwa benda dapat terdiri dari dua hal yaitu barang dan hak. Dalam penjabaran seanjutnya, benda dibagi lagi dalam kategori benda bertubuh dan tidak bertubuh (Pasal 503 KUH Perdata), benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata), dan benda bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUH Perdata). Namun pemisahan jenis benda tersebut belum dapat memberikan petunjuk dalam transaksi yang melibatkan benda. Oleh karena itu beberapa ahli hukum kemudian mencoba memberikan lagi pembagian benda menjadi lebih rinci.

Dalam sistem Hukum Perdata (KUHPer), kata *-zaak*(benda) mempunyai dua arti, yaitu:

1. Barang yang berwujud, yaitu barang yang dapat diraba dengan pancaindera seperti, tanah, rumah, binatang, dan lain-lain
2. Bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak*selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, seperti hak pengarang

Menurut P.N.H.Simanjuntak, hukum benda yaitu: Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.[[7]](#footnote-7)

Menurut subekti membagi menjadi 3 benda :

1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh setiap orang.
2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja.
3. Benda adalah sebagai objek hukum.[[8]](#footnote-8)

Hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua macam; yakni hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas seperti hak pengabdian perkarangan. Sedangkan Hak jaminan adalah memberi kepada kreditur hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani seperti, hak tanggungan dan gadai.

Kemudian harta sangat erat dengan status perkawinan sehingga dimuat didalam sebuah peraturan perundang-undangan perkawinan, menurut Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Selain bahwa penyimpangan atas prinsip persatuan-harta secara bulat, harus disepakati oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian kawin, dalam KUH Perdata juga berlaku asas, bahwa bentuk harta perkawinan bersifat tetap,  dalam arti sepanjang perkawinan tidak bisa diubah. Prinsip itu dipegang teguh demi untuk melindungi kepentingan tagihan pihak ketiga kreditur, yang -sebagaimana telah disebut di depan- pada asasnya dijamin dengan harta milik debitur, padahal harta mana yang menjadi milik debitur, dipengaruhi oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi debitur.

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikatakan:

* + 1. “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
    2. “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Kalau menurut KUH Perdata, harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan semuanya masuk dalam satu kelompok harta, yaitu harta-persatuan. Maka menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang menjadi satu adalah harta yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan. Demikian itu kalau istilah “harta bersama” mempunyai arti yang sama dengan “harta persatuan”, yang menjadi milik suami-isteri bersama-sama yang menurut asas yang dianut dalam KUH Perdata dalam wujud pemilikkan-bersama yang terikat (gebonden mede-eigendom).

Dari uraian diatas, intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian keetentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (*subyek hukum*) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*Zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya berada.  disini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda dan hak-hak kebendaan.

1. **Macam-Macam Harta Benda**

Dalam  berbagai literatur  dikenal macam-macam benda, yaitu:

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar perdagangan”(contoh: jalan jalan dan lapangan umum).
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda).
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah).
5. Barang-barang yang berwujud *(lichamelijk)* dapat ditangkap dengan pancainderadan barang-barang yang tidak berwujud *(onlichamelijk)*yakni hak hak subjektif*.*
6. Barang-barang yang dapat dipakai habis. *(verbruikbaar)*dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis *(onver­bruikbaar).*
7. Barang-barang yang sudah ada *(tegenwoordige zaken)*dan barang-barang yang masih akan ada *(toekomstige zaken).*Barang yang akan ada dibedakan: misalnya panen yang akan datang

Dalam Pasal 503, 504, 505 KUHPerdata telah ditentukan pembagian benda, yaitu pertama; benda berwujud dan benda tidak berwujud, kedua; benda bergerak dan tidak bergerak, dan ketiga; benda yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan.

Dari pembagian macam-macam benda yang telah dikemuka­kan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut Pasal 504 KUHPer, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak ber­gerak.

* 1. Benda bergerak ialah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetap­an undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, mi­salnya: kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPer). Menurut Pasal 505 KUHPer, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.
  2. Benda tidak bergerak lalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Yang termasuk dalam katagori benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut termasuk akar-akaran, tanaman, pohon-pohon yang melekat diatas tanah tersebut. Disini berlaku asas perlekatan.

Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, kapal-kapal, perahu-perahu tambang, mesin dalam suatu pabrik (Pasal 507 KUHPerdata).

Sedangkan benda tidak bergerak yang ditentukan undang-undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata). Yang termasuk dalam katagori benda tidak bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

* Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, yaitu hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemilikinya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya (Pasal 756 KUHPerdata)

Hak pakai dan hak mendiami adalah keduanya hak kebendaan yang diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti Hak Pakai Hasil (Pasal 818 KUHPerdata)

* Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik yang diabadikan (Pasal 1770 KUHPerdata) maupun bunga cagak hidup (Pasal 1775 KUHPerdata)
* Hak pengabdian tanah (pekarangan) adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang lain. (Pasal 674 KUHPerdata)
* Hak numpang pekarangan adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain (Pasal 711 KUHPerdata)
* Hak usaha (*erfacht*) adalah suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang yang tidak bergerak milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah sebagai pengakuan tanah kepemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan (Pasal 720 KUHPerdata)
* Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi, merupakan beban yang diikatkan kepada tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan (Pasal 737 KUHPerdata)

Ada dua arti penting pembagian antara benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu pertama; penting untuk penyerahan; oleh karena untuk penyerahan benda tidak bergerak biasanya diperlukan pendaftaran, seperti tanah harus didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan untuk benda yang bergerak biasanya dilakukan dengan penyerahan nyata; dan kedua, sangat diperlukan untuk pembebanan atau jaminan hak tanggungan untuk tanah (benda yang tidak bergerak) gadai untuk benda yang bergerak

1. **Ketentuan Hukum Tentang Kepailitan**
   1. **Pengertian Kepailitan**

Pailit adalah upaya bersama untuk mendapatkan hak kreditor secara adil, dengan mengimbangi bersaran piutang dengan cara teratur.[[9]](#footnote-9) Sedangkan Kepailitan adalah jatunya sita umum atas segala harta kekayaan debitor pailit yang diurus dan dibereskan oleh kurator yang langsung diawasi orang hakim pengawas, sesuai dengan undang undang No. 37 Tahun 2014.[[10]](#footnote-10)

Sesesorang yang dapat dianggap pantas untuk dinyatakan pailit atau bangkrut jika ada sedikitnya dua orang berpiutang dan tidak membayar utangnya kepada si pemberi utang, atau permohonan dari salah satu dari mereka atau atas permintaan si berutang sendiri, si berutang dapat memohon kepailitan dan oleh pengadilan menerima dan dinyatakan dalam keadaan pailit atau bangkrut.[[11]](#footnote-11)

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.6 Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada prinsip dari putusan pengadilan yaitu“commercial exit from financial distress” yaitu bahwa kepailitan merupakan jalan terbaik dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang dalam kebangkrutan tetapu juga bukan untuk membangkrutkan suatu usaha. Sebenarnya alat ini tidak untuk memudahkan mempailitkan debitor melainkan dalam konteks untuk menyelesaikan utang dikarenakan bermasalah dengan keuangannya dari usahanya. Prinsip ini ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas.[[12]](#footnote-12)

Kepailitan meliputi semua proses seseorang debitor yang sedang dalam keadaan tidak punya uang atau sulit keuangan dimana untuk membayat utangnya oleh pengadilan dinyatakan pailit, dalam hal ini yaitu pengadilan niaga, disebabkan debitor tidak sanggung untuk membayar hutangnya.[[13]](#footnote-13)

Kepailitan mempunyai kata dasar itu pailit. Pailit adalah semua yang terhubung dengan keadaan kejadian atau peristiwa dimana seorang debitor berhenti membayar utangnya diwaktu yang telah ditentukan.[[14]](#footnote-14)

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “to fail”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “fallire”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang–utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan “Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha kreditor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atau seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kapailitian dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor.[[15]](#footnote-15)

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah Faillessementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoove van zijn gezamenlijke schuldieser”.( Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).[[16]](#footnote-16)

Menurut munir faudi mengatakan bahwa kepailitan dapat juga dipahami seabagai suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur. Hal 11 buku kompetisi.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary petition for bankruptcy).

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip dari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah mempunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan di miliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.[[17]](#footnote-17)

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

Pengertian atas kepailitan merupakan definisi pertama dan primer yang perlu diperhatikan dan dipahami sebelum mempelajari hukum kepailitan secara menyeluruh. Dalam undang-undang Kepailitan di Indonesia menganut prinsip debt collection. Hal itu terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan dan likuidasi. Sedangkan prinsip debt forgiveness, Undang-undang kepailitan sama sekali tidak menganutnya terutama yang berkaitan dengan penghapusan utang dan pemberian status fresh-starthing.

Dalam Undang-undang Kepailitan menerapkan prinsip utang tidak bisa dihapus dengan pengampunan. Dalam sistem kepailitan di Indonesia tidak dikenal apa yang dinamakan fresh-starthing setelah terjadinya kepailitan. Konsep fresh-starting ini memberikan status kepada debitor pailit bersih sama sekali dari utang-utangnya, dan bisa memulai kembali usahanya lagi tanpa dibebani dengan utang-utang yang lama. Dalam hukum kepailitan Indonesia, utang debitor pailit adalah akan mengkuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali.[[18]](#footnote-18)

Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang pada tanggal 9 September (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135), kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 22 September 2004 dan telah diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu dan menambah berbagai ketentuan baru kedalam undang-undang yang sudah ada.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadkan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.[[19]](#footnote-19)

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggungjawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepalitian sebagia lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sabagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata :

*“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*

Pasal 1132 KUH Perdata :

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengtangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”*

* 1. **Pihak yang dapat dinyatakan pailit**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang undang kepailitan, terbukti telah memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagai berikut :

1. **Orang Perorangan**

Baik laki laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.[[20]](#footnote-20)

1. **Harta Peninggalan (Warisan)**

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang Undang Kepailitan, yang mengtur bahwa pernyataan pailit tersebut boleh diminta selama belum lewat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.[[21]](#footnote-21)

1. **Perkumpulan Perseroan**

Undang undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu *holding company* dan anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan permohonan dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.[[22]](#footnote-22)

1. **Penjamin (Guarantor)**

Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor, apabila bersangkutan dan tidak memenuhi kewajibannya.

Seorang *guarantor* adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor ketika si debitor lalai/cidera janji. Penjamin baru menjadi debitor/berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu.[[23]](#footnote-23)

1. **Badan Hukum**

Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ, dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. organ itu hanya mengikatkan badan hukum jika tindakan tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu.[[24]](#footnote-24)

1. **Perkumpulan Bukan Badan Hukum**

Badan yang termasuk dalam perkumpulan bukan badan hukum adalah:

1. Persekutuan perdata
2. Persekutuan firma
3. Persekutuan komanditer.
4. **Pengaturan Norma Hukum Kepailitan Dalam Undang undangan Kepailitian**

Yang dimaksud dengan adanya kelembagaan eksternal dalam kepailitan adalah lembaga organ organ yang ada dalam proses kepailitan

1. **Lembaga Yang Berkaitan Dengan Kepailitan**
2. **Pengadilan Niaga**

Pembentukan Pengadilan Niaga dalam lingkup pengadilan negeri. Dalam pasal 10 UUKK ditentukan adanya 4 jenis peradilan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu :

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan agama,
3. Peradilan tata usaha negara,
4. Peradilan militer,[[25]](#footnote-25)
5. **Hakim Pengawas**

Keberadaan hakim pengawas sangat penting serta sangat diperlukan dalam proses pengurusan dan pembersan harta pailit. Hal ini mengingat tugas dan tanggungjawab kurator yang sedemikian berat terlebih jika debitor pailit itu suatu perseroan terbatas. Disamping itu pula, hakim pengawas berfungsi sebagai pengawas tugas tugas kurator itu sendiri. karena itu kurator dan hakim pengawas merupakan dua variabel penting dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kedua lembaga ini adalah masing masing berdiri sendiri, namun sulit untuk dipisahkan. Hakim pengawas bukanlah superordinasi dari kurator dan kurator bukan bukan subordinasi dari hakim pengawas, demikian pula sebaliknya. Keduanya memilik tugas, wewenang dan tanggungjawab masing masing.

Adapun tugas, wewenang, dan tanggungjawab hakim pengawas menurut Undang undang Kepailitan adalah antara lain sebagai beriku, bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, hakim pengawas menetapkan paling sedikit (2) surat kabar harian untuk mengumumkan mengenai kepailitan tentang ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor
2. Nama hakim pengawas
3. Naman, alamat, dan pekerjaan kurator
4. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk
5. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.[[26]](#footnote-26)
6. **Hakim Ad hoc**

Disamping terdapat hakim pengawas dalam proses kepailitan, dalam persidangan Peradilan Niaga juga dimungkinkannya Hakim ad hoc. Dala peraturan Mahkamah Agung tersebut dikatakan bahwa untuk menunjuk hakim ad hoc, ketua pengadilan niaga wajib memberikan : a. sifat k kompleksitas perkara/sengeketa yang dihadapi, b. aspek internasional dan penerapan hukumnya, c. spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili, d. wawasn keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.[[27]](#footnote-27)

1. **Kurator**

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit,. Vollmar menyatakan bahwa, “de kurator is belast, al dus de wet, met het beheer an de vereffening van de failiete boedel.: kurator adalah bertugas, menurut undang undang, mengurus, dan membesarkan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangakatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pngadilan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

1. **Hukum Acara Kepailitan**
2. **Syarat Pailit**

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 ada dua syarat :

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.[[28]](#footnote-28)

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

Selain itu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

-     Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

-      Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

-     Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

1. **Tata cara pengajuan permohonan pailit**

* **Syarat dan Prosedur Pengajuan Kepailitan**

Dalam mengajukan kepailitan, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga nanti pengajuan tersebut bisa diproses dan diputuskan. Pemenuhan syarat pengajuan kepailitan ini termasuk dalam prosedur pengajuan kepailitan. Adapun syarat pengajuan kepailitan ini diatur langsung dalam UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan, syarat yuridis kepailitan harus dipenuhi terlebih dahulu, agar bisa mengajukan kepailitan atas sebuah perusahaan. Syaratnya adalah adanya utang yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya, ada 2 atau lebih kreditur, adanya debitur, permohonan pernyataan pailit dan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.

Agar bisa memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, maka ada prosedur pengajuan kepailitan juga yang harus dijalani. Prosedur pengajuan ini sendiri diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 yang membahas tentang Kepailitan. Berikut prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.

* + 1. **Pengajuan Kepengadilan**

Pengajuan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. dalam hal ini Menunjuk Advokat Berlisensi Kurator

* + 1. **Penyampaian Pernyataan Permohonan Pailit**

Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Hari sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

* + 1. **Sidang Pemeriksaan Permohonan Kepailitan**

Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

* + 1. **Pemanggilan Debitur Oleh Pengadilan**

Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.

* + 1. **Pemanggilan Kreditur**

Kreditur bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang perlu dipenuhi.

* + 1. **Pemanggilan Debitur dan Kreditur dengan Surat Kilat**

Pemanggilan atas debitur atau kreditur akan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat, paling alam 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan.

* + 1. **Putusan Pengadilan Terkait Kepailitan**

Putusan pengadilan akan permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan.

* + 1. **Pembacaan Putusan**

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan penyataan pailit tersebut harus termuat secara lengkap di dalamnya. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat Majelis Hakim, yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum atas putusan tersebut.[[29]](#footnote-29)

1. **Proses persidangan**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU Kepailitan”**), Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga (“**Pengadilan**”) dalam lingkungan peradilan umum. Prosedur pengajuan permohonan perkara kepailitan, dapat dilihat di dalam Artikel “Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga”. Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu: Prosedur pengajuan permohonan perkara kepailitan, dapat dilihat di dalam Artikel “Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga”. Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

1.  Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.

2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan tersebut wajib memuat:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 10 UU Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1)    meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau

2)    menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

a)    pengelolaan usaha debitor; dan

b)   pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada Pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak lain yang bersangkutan, mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR**

1. **Pengertian Kurator**

Kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana di perlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan (pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya.[[30]](#footnote-30)

Profesi kurator dan pengurus pada prinsipnya merupakan profesi yang terkait erat dengan pekerjaan untuk membereskan dan mengurus proses kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang atas diri orang perseorangan atau badan usaha (baik yang berbadan hukum ataupun tidak), yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam keadaan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.[[31]](#footnote-31)

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang – undang dan memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta benda debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

Vollmar menyatakan bahwa :

*“De kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”*

Yang memiliki arti bahwa kurator adalah bertugas, menurut undang – undang, mengurus, dan membereskan harta pailit.[[32]](#footnote-32)

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.[[33]](#footnote-33)

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyebutkan bahwa: “Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Kepailitan (Pasal – pasal 69 dan 70) dan peraturan pelaksanaannya.”

Yang di maskud dengan “keahlian khusus” adalah mereka mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sedangkan pengertian terdaftar adalah telah 46 M. Hadi Shubhan, menuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. (Penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b).

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan penting dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena perannya besar dan tugasnya yang berar maka tidak semabarangan orang dapat menajdi pihak kuraotr. Karena itu pula maka persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di ataur secara relatif ketat.

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hak debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Penginggalan bertindak selaku kurator.

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang – undang dan memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta benda debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri

Yang dimaksud dengan kurator menurut **Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang" \t "_blank) (“UU KPKPU”)**adalah: Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

1. **Syarat Kurator**

**Berikut persyaratan dan prosedur untuk menjadi kurator:**

* + 1. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kurator diajukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang harus memenuhi persyaratan:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
3. setia pada Pancasila dan [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" \t "_blank);
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak merangkap jabatan,**kecuali sebagai:**
6. advokat;
7. akuntan publik;
8. mediator;
9. konsultan hak kekayaan intelektual;
10. konsultan hukum pasar modal; dan
11. arbiter;
12. **advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;**
13. telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama, yaitu perwakilan dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan organisasi profesi (perkumpulan profesi kurator dan pengurus yang berbadan hukum);
14. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
16. bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit; dan
17. bersedia dihapus dari daftar kurator dan pengurus, jika terbukti melanggar kode etik kurator dan pengurus dan ketentuan perundang-undangan.
    * 1. selain mengisi permohonan pendaftaran kurator, pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa:
18. kartu tanda penduduk;
19. nomor pokok wajib pajak;
20. sertifikat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang dikeluarkan oleh komite bersama;
21. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
22. surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
23. surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit;
24. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit;
25. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
26. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit;
28. surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar kurator dan pengurus, jika terbukti melanggar kode etik kurator dan pengurus dan ketentuan perundang-undangan;
29. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
30. surat keterangan catatan kepolisian;
31. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm;
32. surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik;
33. surat keterangan telah bekerja pada kantor advokatatau kantor akuntan publikpaling singkat 3 tahun; dan
34. ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
    * 1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan verifikasi administrasi secara elektronik setiap permohonan tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Bila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberitahukan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dan harus dilengkapi pemohon dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan itu disampaikan. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi dokumen**, permohonan dinyatakan ditolak**, dan biaya permohonan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai kurator. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tersebut dokumen persyaratan lengkap, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan **surat bukti pendaftaran kurator** yang disampaikan secara elektronik ke pemohon melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Surat bukti pendaftaran kurator dapat langsung dicetak pemohon menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80gram serta berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

1. Syarat menjadi kurator

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang-undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai harta peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggungjawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampunan).

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, maka yang dapat bertindak sebagai Kurator sesuai dengan pasal 70 UUK, adalah

1. Balai harta peninggalan, atau
2. Kurator lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah :

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhka dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Dan
2. Telah terdaftar pada departemen Kehakimana.
3. Penunjukan Kurator

Debitor atau kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjukan kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Undang-undang Kepailitan memerikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Independen dan tidak mempunyai benturan

1. **Tugas-tugas kurator**

Dalam melaksanakan tugas, seorang kurator memiliki tugas utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Secara umum, tugas kurator dapat dilihat pada job description, di antaranya sebagai berikut:

* + 1. Kurator Sementara

sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang merugikan hartanya. Adapun beberapa tugas utama seorang kurator sementara ialah mengawasi pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditur, pengalihan kekayaan saat kepailitan memerlukan kurator.

* + 1. Pengurus

Tugas pengurus adalah untuk menyelenggarakan serta pengadministrasian proses Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat atau pertemuan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur. Sementara itu, pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan debitur atau kreditur.

* + 1. Sebagai Kurator

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit. Sebagai akibat dari pailit, saat keputusan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

1. **Tanggungjawab Kurator**

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.[[34]](#footnote-34)

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaikbaiknya. Hal ini dikarenakan kurator harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan harta debitor pailitdan kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya,maka hukum membatasi kekuasaan tersbut dengan mengadakan sanksi.Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi.

Tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit.[[35]](#footnote-35) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-undang Kepailitan. Kurator tidak boleh ada conflict of interest (benturan kepentingan) didalamnya, kurator haruslah independen.[[36]](#footnote-36) Maka kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi tanggungjawab seorang kurator dalam menjalan tugasnya tidak dalam tekanan.

* 1. Tugas kurator

Menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas sebagai berikut :

* + 1. Melakukan pengurusan/dan atau pemberesan harta pailit.
    2. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat per-setujuan dari Debitor (meskipun dipersyaratkan).
    3. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).
    4. Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya. (pasal 70 Ayat 1)
  1. Menjadi Kurator

Menurut pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah :

* 1. Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah RI)
  2. Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan
  3. Kurator Dapat Diganti

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 seorang kurator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat kurator tambaha :

* + - 1. Atas permohonan kurator sendiri.
      2. Atas permohonan kurator lainnya, jika ada.
      3. Usulan hakim pengawas.
      4. Atas permintaan debitor pailit.
      5. Atas usul kreditor konkuren.
  1. Tanggungjawab Kreditor

Menurut pasal 72 UU Nomor 37 tahun 2004, seorang kurator mempunyai tanggujawab yaitu :

* + - * 1. Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
        2. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
        3. Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.
        4. Upah kurator ditetapkan berdasarkan permohonan yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
  + Masa Tugas Kurator
    1. Awal

Awal tugas seorang kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

* + 1. Akhir

Tugas kurator berakhir jika :

* + 1. Akur yang telah dihomologasikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
    2. Fase insolvensi daftar pembagian terkahir mempunyai kekuatan hukum tetap.
    3. Kepailitan dicabut karena boedel sangat sedikit bahkan nihil.
  + Tugas dan wewenang Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang kepailitan yaitu :

Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberihatukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

* + - 1. Pengurusan harta Pailit

Dalam menjalankan tugas seorang kurator membuat working-paper (kertas kerja) demi tanggungjawangdan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan.

Standar profesi kurator dan pengurus menjelaskan bahwa dalma kertas kerja seorang kurator, setidaknya memuat data/informasi berikut catatan-catatan tentang :

* Dokumentasi administrasi yang menjadi dasar penugasan.
* Rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada awal penugasan.
* Korespondensi dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan.
* Dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung) yang berhubungan dengan harta pailit atau kewajiban harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit atau pertelaanya.
* Catatan hal-hal yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalankan penugasannya.
* Minuta rapat-rapat yang diselenggarakan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat kreditor dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas.
* Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan representasi yang dibuat kurator selama penugasannya.
* Matrikulasi kemajuan kerja
* Laporan-laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepailitan.

Adapun tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah antara lain sebagai berikut, bahwa kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawa, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan olah hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pertanyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

* + Nama, alamat, dan pekerjaan debitor.
  + Nama hakim pengawas.
  + Nama, alamat, pekerjaan kurator.
  + Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk,
  + Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
    - 1. Pemberesan harta pailit

Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Dalam melaksanakan penujualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal di antaranya sebagai berikut :

* Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
* Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari.
* Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pembersan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diantaranya :

* Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
* Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh pesetujuan atau bantuan debitor.
* Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
* Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari :

* + 1. Penerimaan dan pengeluaran (temasuk imbalan jasa kurator)
    2. Nama-nama para kreditor
    3. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutan
    4. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutan tersebut.

Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggungjawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat :

1. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh :
   * 1. Rekening bank dan rekening Koran.
     2. Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/ batu mulia.
     3. Benda tidak bergerak milik debitor pailit.
     4. Benda bergerak; dan
     5. Harta kekayaan lain dari debitor.
2. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
3. Analisis kelangsungan usaha debitor
4. Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian :
   * + 1. Penerimaan-penerimaan
       2. Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.
5. Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut;
6. Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

**BAB IV**

**TANGGUNJAWAB KURATOR TERHADAP HARTA BENDA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**

1. **Bagaimana Pengaturan Secara Normatif Tanggungjawab Kurator Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan**

Peran kurator didalam menjalankan tugas untuk membersi harta pailit yang dinyatakan pailit saat terjadi kepailtian. Terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dalam undang undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 bahwa seorang kurator mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya untuk mengurusi dan membereskan harta pailit pada saat diputuskannya pailit dari pengadilan niaga walaupun putusan tersebut ada pengajuan ketingkat kasasi ataupun peninjauan kembali.

Sehingga berdasarkan undang undang kepailitan di pasal 61 (1) diatas, bahwa kita dapat melihat kewenangan seorang kurator juga dapat meliputi tingkatan yang lebih luas. Bahkan jika dilihat dari ayat 2 dari pasal ini, pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa “seandainya keputusan kepailitan itu tidak jadi atau dibatalkan dikarenakan suatu adanya kasasi maupun peninjauan kembali, bahwa ketika kurator sudah melakukan tindakan semenjak ditetapkan pailit namun tanpa diketahui kurator sesuai pasal 17 maka akan tetap bisa mengikat debitor.

Tujuan dari kepailitan itu sendiri untuk melakukan pembayaran hak kreditor sesuai tingkat urutan tuntutan yang mereka minta. Sedangkan tugas seorang kurator sesuia ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

1. Kurator hanya bertindak sesuai dengan kewenangannya.
2. Tugas yang paling utama seorang kurator yaitu mengurusi dan membereskan harta yang dinyatakan pailit.
3. Diberikan ruang untuk melakukan tindakan lebih seperti peminjaman yang diberikan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk menambah harga dari harta yang dipailitkan itu.
4. Atas persetujuan dari hakim pengawas seorang kurator memiliki kewenangan untuk membebani harta pailit dari hak tanggungan, gadan dan Hak Agunan.
5. Dalam pasal 36 terdapat kewenangan kurator merupakan perjanjian timbal balik kecuali ada perjanjian bahwa debitur memiliki hak sendiri untuk melakukan perbuatan.
6. Mempunyai kuasa untuk menjual agunan baik yang bergerak maupun tidak.
7. Kurator diberikan kewenangan yang disetujui oleh hakim pengawas untuk melanjutkan usaha debitur (juga tidak ada masalah jika putusan tersebut naik ketingkat kasasi ataupun peninjauan kembali di dalam Pasal 104).
8. Kewajiban kurator untuk menguraikan dan mencatat semua yang berhubungan dengan harta pailit ada dalam Pasal 100.
9. Kurator bisa memindahkan harta pailit sebelum diverikasi sesua persetujuan hakim pengawas.
10. Wajib bagi kurator untuk membuat daftar piutang dan mencocokannya.
11. Membayar utang kreditor sebagai tugas terpenting kurator yang wajib dijalankan.
12. Kurator sesuai pranata hukum action paulita bisa melakukan tuntutan.
13. Kurator bisa membayarkan benda yang menjadi agunan kepada kreditor yang sesuai dengan jumlah yang terkecil dari harga barang pasar agunan dengan barang agunan yang dijaminkan.
14. Kurator berhak mendapatkan imbalan atas jasanya yang telah selesai melakukan tugasnya dan imbalan yang didapatkan tersebut

Wewenang dapat diartikan yaitu :

1. Diberikan Hak dan kekuasaan untuk bertindak; dalam kewenangannya sebagai kurator;
2. Bisa melakukan tindakan. Berdasarkan persetujuan hakim pengawas
3. Sesuai dengan fungsinya.

Kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang segala hak dan kewenangannya itu berdasarkan peraturan yang sedang berjalan di dalamnya. Maka segala tindakan hukum itu harus berdasarkan kaedah norma, berarti dalam suatu jabatan tersebut menempel sebuah kewenangan hak yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang sedang berjalan saat itu. Jadi sesuai dengan arti dari wewenang yang disebutkan bahwa kewenangan yang menempel pada kurator ini harus dilaksanakan tetapi juga boleh tidak dilaksanakan, adapun yang menjadi kewenangan seorang kurator adalah sebagai berikut :

1. Tidak harus mendapatkan persetujuan dari seorang debitor dulu untuk memberitahukan walaupun tindakan tersebut tidak dalam posisi pailit dan hal ini tidak ada syarat yang menentukan bahwa seorang kurator harus memberitahukan kepada debitor.
2. Pihak lain yang mana telah menyetujuinya, dari Kewenangan kurator untuk melakukan tindakan.

Untuk mengetahui bagaimana seorang kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah terdapat kelalaian ataupun kesalahanya. Menurut pasal 27 seorang kurator memiliki 2 hal yang wajib untuk dijalankan berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi kewajiban yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu kurator menjalankan tugasnya sudah dalam aturan yang telah menjadi ketentuan dari perundangan.
2. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*, dimana kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*, *Fiduciary duties* kurator adalah terhadap:
3. Pengadilan; yang terdapat dalam UU Kepailitan Indonesia akan diwakili oleh seorang hakim pengawas;
4. Debitor yang dinyatakan pailit;
5. Para para kreditor;
6. Para pemegang saham.

Pengertian yang ada didalam pasal 78 (1) Undang undang kepalitan, dimana melakukan tindak kepada pihak ketiga, perlu izinnya hakim pengawas sebelum kurator melakukan perbuatan sehingga jika hal tersebut tidak mendapatkan izin dari hakim pengawas berarti kurator telah melakukan kesalahan atau mengenyampingkan Pasal 83, 84, bahwa secara hukum perbuatan terhadap pihak ketiga itu adalah sah. Namun ada konsekuensi terdapat dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kurator secara pribadi mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut terhadap debitor pailit dan kreditor dikarenakan hal tersebut tidak dalam persetujuan hakim pengawas.

Sebagai keseriusan kurator dalam pertanggungjawaban hukum kurator atas segala akibat dari kelalaian dan kesalahan kurator yang menimbulkan kerugian yang dilakukan seorang kurator, tanpa disetujui dari hakim pengawas sebagai pengawas kurator dalam menyelesaikan persoalan pailit, sehingga kurator mempertanggungjawabkan untuk pribadi kurator dan akibat yang ditimbulkan kurator harus membarnya, hal demikian apabila tanggungjawab tersebut terjadi, seperti ketika kurator dengan sengaja dianggap mengambil harta pailit dan apa saja yang muncul yang menyebabkan kerugian. Suatu akibat dari ketidak profesionalnya kurator itu secara mutklak akan menjadi tanggungjawab kurator sendiri, dan akibat kerugian itu tidak boleh disandarkan kepada harta pailit. Kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas sehingga bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dipengadilan, yang bukan mengenai hal ini adalah sebagaiberkut :

1. Permasalahan hukum tentang pencocokkan piutang;atau
2. Sengketa tentang perjanjian pelaksanaan timbal balik untuk kelanjutan yang belum atau baru sebagian dipenuhi.
3. Sengketa Debitor pailit dengan melakukan penghentian sewa dengan pihak lain.

Salah satu bentuk tanggung jawab hukum dalam mengurusi dan menyelesaikan suatu kepailitan, sebagai akibat dari kesalahan ataupun kelalaian seorang kurator yang menyebabkan kerusakan dan berkurangnya nilai harta pailit sesuai dengan dalam pasal 74 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)bulan.” Kemudian kurator dalam menyampaikan laporan harus bersifat terbuka untuk umum dan setiap orang dapat melihatnya dengan mudah, dan sangat jelas dan tegas ketentuan ini terdapat dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dijelaskan juga dalam pasal 1365 KUHPerdata bentuk tanggungjawab hukum kurator, mengenai perbuatan melanggar hukum. bahwa kurator secara pribadi dapat digugat dimuka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu terhadap pihak yang merasa dirugikan baik itu sikap dan perbuatannya. Dan bahkan seorang kurator bisa dipidana atas perbuatanya itu.

Segala sesuatu dari ketentuan ini yang kurator lakukan yang dapat menyebabkan kerugikan terhadap harta yang telah dipailitkan dan segala tindakan oleh pihak yang lain yang di sebut pihak ketiga adalah perbuatan yang diluar kewenangan yang dimiliki kurator yang telah diamanatkan kepadanya oleh aturan perundangan kepailitan, maka harta pailit harus lepas dari beban yang timbul dari akibat yang bukan dari kesalahan kurator secara pribadi.

Salah satu pihak yang dapat melakukan tuntutan karena adanya dasar untuk melakukan penagihan atas haknya adalah :

1. Saat melakukan pembagian kurator tidak memasukkan daftar kreditor yang berhak menjadi penerima;
2. Saat penjualan harta dari harta pailit tersebut kurator lupa memasukkan kedaftar harta kepailitan.
3. Kurator telah melakukan penualan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga.
4. Yang dilakukan kurator untuk melakukan sita dari harta debitor yang pailit karena dalam penututannya telah sah bahwa itu palsu.

Cara mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai kurator ketika terjadi kesalahan dalam proses kepailitan, sesuai padal 77 angka 1 saat kurator melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan tujuan kreditor , maka kreditor mengajukan keberatan atas apa yang dilakukan kurator dalam jangka 3 hari, undang undang kepailitan bahwa dalam waktu 3 hari hakim pengawas harus menerima tanggapan dari kurator.

Perlidungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena tanggungjawabnya yang sangat berat, tentu akan menghadapi kesulitan-kesulitan karena sering terjadi ketika debitor tidak ingin dirina dipailitkan. Masalah seperti debitor bersikap nonkooperatif bahkan menyerang dengan kekerasan fisik, ataupun mental sehingga ada suatu kebimbangan atau cendrung akan memihak, padahal kurator sebagai profesi yang memiliki kode etik, bahwa kurator dengan bebas dalam menjalankan tugasnya dengan dasar aturan yang ada.

Secara pribadi ini sangat berat bagi kurator saat melaksanakan tugasnya mengalami masalah ataupun rintangan, sehingga disisilain perlindungan hukum bagi kurator untuk membersekan harti palit ini sangatlah diperlukan. Upaya untuk melindungi sebagai hak asasi manusia, sehingga apa yang menjadi kepentingannya tercapai. Pasal 50 KUHP untungnya sudah cukup untuk menjadi tameng sebagai pelindung bagi kurator yang sedang melaksanakan tugasnya, maka apapun yang dilakukan kurator sepanjang tidak menyalahi aturan undang undang makan tidak perbuatan itu tidak bisa dipidana.

Perlindungan hukum bagi kurator menurut pasal 50 ini sudah cukup bagi kurator untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun hal tersebut agaknya kurang di dalam undang-undang kepailitan didalamnya mengatur tentang perlindungan bagi kurator sangatlah minim yang yang berkaitan dengan tugas kurator. Kemudian undang undang sangatlah tidak menjelaskan secara detail membicarakan soal perlindungan huku terhadap kurator pada saat menjalankan tugas untuk mengurusi dan memberis harta pailit ini.

1. **Apa yang menjadi Kelemahan seorang kurator dalam Pengurusan / Pemberesan terhadap harta benda perseroan terbatas yang dinyatakan pailit menurut undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitian**

Dalam kepailitan kurator di temukan pengertian dari pasl 1 (5) UU Kepailitan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Adapun pihak dalam menyelesaikan suatu kepailitan untuk bisa sebagai kurator adalah setiap orang atau lembaga yang mengatur urusan kepailitan itu harus di sahkan oleh suatu lembaga pemerintahan yaitu departemen kehakiman yang sudah melewati syarat khusus yang sudah diseleksi sedemikian rupanya dari tujuan tersebut di mana seorang kuratut dituntut mempunyak kemampuan dan keahlian khusus oleh seorang kurator untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitian. Dimulainya perkara kepailitan diawali dengan adanya putusan pailit dari pengadilan sehingga dikeluarkannya kepailitan terhadap debitor, maka seorang debitur yang mengalami pailit dan sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dia tidak berhak atau dilepaskan baginya hak untuk memanfaatkan semua harta bendanya dan selanjutnya harta benda yang tidak boleh seorang debitor pailit manfaatkan maka pengadilan akan segera menetapkan seorang kurator pailit untuk kemudian yang mengurusi dan menguasai terhadap harta pailit yang dimiliki debitor pailit sebelumnya.

Seorang kuartor di berikan hak untuk melakukan pengambilan dan mengalihkan harta yang pailit dari debitor pailit ini, hak dari harta debitor akan dibereskan oleh seorang kuartor sehingga kurator diberikan tanggungjawab untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan tanggap serta harus bekerja dengan cerdas, selain itu juga seorang kurator dengan kamampuan khususnya bisa dengan cepat bisa menyelematkan setiap aset dan juga harta dari seorang debitor pailit dimana tujuannya untuk kepentingan kreditor sesuai dengan tujuan dipailitkannya itu. Dari tujuan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan itu untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri yang dilakukan oleh kreditur yang bersangkutan dengan debitor maka dari itu dengan dipailitkannya harta seorang debitor sehingga bisa dilakukan pembagian harta pailit itu secara adil dan dapat disebut dengan Concursus Creditorum.

Maka dari itu seorang kurator mempunyai kewenangan lain sebagaimana yang telah dipaparkan secara jelas didalam undang-undang kepailitan. Kurator selain menyelesaikan harta pailit juga mempunyai kewenangan lain yaitu juga memikirkan bagaimana hal yang lebih mendasar suatu tindakan kurator ini harus bertindak untuk kepentingan yang paling baiknya dari tujuan seorang kreditor, bukan berarti mengeyampingkan kepentingan kreditor pailit juga dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu kurator sudah di berikan peraturan yang mendasari sesuai undang-undang kepailitan, maka tugas yang paling primer adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 37 ayat 3 seorang kurator hanya bertindak sebatas apa yang menjadi tugasnya
2. Melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dari kurator adalah melakukan mengurusi dan memberi harta yang telah pailit.
3. Karena adanya tujuan bagaimana cara menambah harga harta pailit, sehingga kurator mamakai kewenangannya untuk melakukan tindakan lain yaitu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
4. Hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya maka wewenang yang diberikan kepada kurator atas dasar persetujuan hakim pengawas maka kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit.
5. Tujuan dari pasal 36 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga dengan debitor pailit bahwa dalam perjanjian tersebut adanya perjanjian timbal balik
6. Memiliki wewenangan dari kreditor sparatis untuk menjual agunan setelah 2 (dua) bulan insolvensi kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam.
7. Walaupun dalam keadaan putusan pernyataan pailit itu diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali seorang kurator atas persetujuan hakim pengawas tetap bisa melanjutkan usaha debitor pailit hal ini sesuai dengan pasal 104 undang-undang kepailitan.
8. Pasal 100 menyebutkan bahwa kewajiban kurator membuat uraian dan catatan yang berhubungan dengan harta pailit.
9. Atas persetujuan hakim pengawas seorang kurator berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi.
10. Berdasarkan pasal 116 jo pasal 117 bahwa kurator dengan melaksanakan tugasnya kuratur harus melakukan pendataan yang itu wajib dibuat kemudian harus dicocokkan kedalam daftar utang piutang.
11. Dalam Pasal 201 dalam proses pemberesan seorang kurator berkewajiban untuk membayarkan semua piutang sesuai yang telah di berikannya kepada debitor.
12. Pasal 41 jo pasal 47 ayat 1 kurator dalam menjalankan tugasnya kurator bisa juga bertindak beradasarkan pranata hukum action paulina upaya untuk melakukan penuntutan.
13. Berdasarkan pasal 59 ayat 3 bahwa benda sebagai agunan bisa bebas atas kuasa kurator dengan dibayar kepada kreditor dalam jumlah yang kecil sesuai dengan harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan.

Berdasarkan uraian diatas kita dapat melihat bahwa undang-undang kepailitan bisa kita menyimpulkan kewenangan mutlak yang dimiliki seorang kurator kepada aset dan juga harta seorang debitor, jika kita lihat bahwa seorang kurator didalam melakukan kewenangannya untuk melakukan pengurusan maupun membereskan harta debitor pailit jika kita melihat dari kacamata undang-undang kepailitan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurator memiliki keweenangan yang mutlak terhadap aset dan juga harta dari debitur, yang dimana dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit seorang kurator dapat melakukan hal apa saja yang diatur dalam undang-undang guna memperlancar dan mempercepat proses kepailitan yang berlangsung. Oleh sebab itu profesionalisnya disamping keahliannya kurator dituntut harus cermat dan seksama, karena tanggungjawabnya untuk sebagai kurator untuk baik itu meningkatkan maupun mempertahankan tingkat kepercayaan kepada masyarakat terhadap profesi sebagai kurator. Yang harus menjadi pertimbangan kurator dalam melakukan tugas sebaik-baiknya tidak luput dari aspek bisnis itu sendiri yang menyangku dalam menjual barang ataupun asset lain dari debitur, dan juga pertimbangan serta focus terhadap harga dari harta maupun asset debitur dalam standar yang paling tinggi dalam menimal barang tersebut.

Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan seorang kurator dalam menilai harta dan aset sebagaiberikut yaitu :

1. Harus menganalisa waktu, kapan waktu yang tepat itu tiba untuk menjual aset, kecermatan seorang kurator disini haruslah tepat sehingga harga yang ditentukan dapat meningkatkan harga barang tersebut. Baik itu dalam waktu dekat dan saat yang sudah ditentukan.
2. Perlunya strategi dalam menjual aset baik melalui jual borongan, eceran maupun dalam bentuk paket, hal ini perlu di perhatikan oleh seorang kurator sehingga dari strategi yang diambil tersebut dapat menguntungkan.
3. Pihak ketiga dalam melakukan penjualan ini juga menjadi fokus, sehingga bisa menentukan apakah perlu untuk memakai jasa profesioanl perantara seperti broker dari agen jual beli property.
4. Iklan penjualan juga jadi bahan pertimbangan apakah hal tersebut diperlukan untuk mempermudah penjualan aset.

Hal tersebut diatas kita lihat sebenarnya akan diperlukan dikarenakan mengingat apa tujuan dari kurator tersebut bukan sekedar untuk menjual maupun membereskan harta dari debitur pailit yang tujuannya untuk membayar kepada para kreditor, maka dari itu seorangkurator sudah semestinya harus meningkatkan mutu dan nilai dari aset tersebut sehingga tujuan utamanya dari penjualan itu untuk membela kepentingan kreditor.

Banyak sekali rintangan yang harus dilalui seorang kurator selama dalam proses kepailitan, banyaknya tugas dan juga wewenang seorang kurator pada saat menjalankan tugasnya dalam proses kepailitan, sudah diperkarakan bahkan dipastikan akan menemukan banyak permasalahan ataupun rintangan yang harus dilewati. Akan tetapi tugas dan wewenang yang ada dalam undang-undang sudah cukup, namun dalam praktiknya ketika seorang kurator dan pengurus sering mengalami berbagai hambatan ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Beberapa hambatan yang sering terjadi seperti :

1. Ancaman dari debitor pailit, tidak diberi izin oleh debitor atau menghalang-halangi ketika ingin memasuki kantor atau dikediaman oleh debitor, ataupun secara tegas oleh kuasa hukumnya ingin melaporkan pidana karena tidak ada izin memasuki pekarangan secara melawan hukum. hal ini teradapat dalam pasal 167 KUHP.
2. memasukkan keterangan palsu oleh karena menolak tagihan dari kreditor karena menurut kreditor itu adalah kreditornya. Sehingga dilaporkan ke Polisi atas dasar Pasal 263 KUHP.
3. Kurator melakukan pencemaran nama baik karena sudah mengumumkan kepailitan terhadap kreditor sehingga dilaporkan oleh Debitor ke Polisi.
4. Atas dasar penggelapan dikarenakan telah menjual harta pailit tanpa sepengetahuan debitor sehingga dilaporkan oleh Debitor ke Polisi.

Pada kenyataannya seorang kurator kita bisa melihat bahwa dalam menghadapi debitor tidak jarang seorang debitor mendapatkan tekanan seperti ancaman maupun teror, dan bahkan debitor pailit tidak menerima bahwa dirinya telah dipailitkan, debitor yang tidak kooperatif. Dan bahkan ada sampai di gugat di pengadilan atas dasar kurator melakukan tugasnya dianggap tidak sesuai dan mengira kurator telah melakukan tindakan penggelapan atau mencuri hak debitor. Dan sering terjadi hal seperti ini karena lemahnya perlindungan terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya sehingga harus bersinggungan dengan gugatan pidana. Jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai, maka kurator sangat mudah di kriminalisasi, yang dikakukan oleh seorang debitor dengan laporan pidananya. Padahal ketika seorang kurator dalam menjalankan tugas dalam perkara kepailitan untuk bisa membayar hutang dari seorang debitur tersebut tidak terdapat kelalaian dari kurator ketika melakukan penjualan maupun mengamankan aset debitor.

Kelincahan dalam melakukan tugasnya sebagai kurator ini sangatlah diperlukan, namun hal ini juga ketika proses kapilitan ini berjalan terjadi kesalahan seperti penulisan yang salah ataupun terdapat kekuarangan maka ini menjadi kehilangan waktu, sehingga kurator harus lebih teliti untuk menjaga aset debitur salah satunya dengan permohonan segel terhadap aset debitor yang mungkin akan menghambat proses kepailitan, sesuai peratura perundang-undangan yang berlaku. Sesuai peraturan undang-undang kepailitan yang mengatur wewenang dari seorang kurator.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab terdahulu penulis mendapatkan kesimpulan atas pembahasan tersebut yaitu :

1. Kewenangan Kurator dalam membereskan harta pailit sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, pengurusan dan pemberesan harta pailit juga tidak terlepas dari masalah masalah yang kemudian dapat menghambat proses pailit itu menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Itulah mengapa proses untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator, kurator harus diawasi oleh hakim pengawas, hal tersebut tidak luput dari pengawasan hakim pengawas, sehingga kurator dalam menjalankan tugasnya tidak semena-mena ataupun melalaikan tugasnya, dan juga hak sebagai kurator disini mendapatkan perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum disini jika terdapat segala ancaman yang ada terhadap kurator karena tidak jarang seorang kurator mendapat ancaman dari debitor yang tidak kooperatif, yang dianggap bahwa kurator telah melanggar ketentuan, sedangkan kurator itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada.
3. Bahwa kurator dalam menjalankan tugasnya terdapat kelemahan tidak semua kurator melaksanakan tugas nya dengan tepat waktu, tetapi juga terdapat suatu hambatan, dari pihak kreditor ataupun debitor, dari sisi waktu kurator sangat di haruskan dalam menjalankan tugasnya dengan cepat tetapi juga dengan jam terbang yang tinggi, karena kesalahan sedikit akan menyebabkan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berpengaruh besar, dan bahkan dapat merugikan ataupun ketidak adilan terhadap kreditor, dan tidak jarang kurator mendapat gugatan ataupun sejenisnya karena kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
4. **Saran**
5. Sebaiknya sebagai kurator juga harus mendapatkan pelatihan ataupun jam terbang yang tinggi, kurator dituntut untuk sigap dalam suatu pengurusan bemberesan harta pailit.
6. Perlindungan terhadap kurator juga sangat perlu, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak dibawah ancaman, kurator juga seharusnya mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)* . Pernada Media Grup, Jakarta, 2009

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Bayu Media. Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Kamus Istilah Aneka Hukum”.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000.

Sudarsono, *Kamus Hukum*., PT Asdi Mahasatia Jakarta. 201. 2007

Imran Nating, SH. MH, “*Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana

Imran Natin, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, PT Rajagrafindo Persada, Kelapa Gading Permai, Jakarta. 20004

H. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, “Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus (Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus Yang Profesional dan Independen), Sinar Grafika, Jakarta , 2018

Jimlu Asshidiqie, SH., Dr. M. Ali Safa’at, SH. MH., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press, 2012.

Jonaedi Efendi, S.H.I., MH., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* *(Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok. Prenadamedia Group,

Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, Six Theoriof Justice, Nusa Media, Bandung.

M. Marwan, SH., Jimmy P, SH., *Kamus Hukum* (*DICTIONARY OF LAW COMPLETE EDITION*), Jakarta, Reality Publisher.

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan.* Sinar Grafika: Jakarta. 2009.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Hlm. 35 Dikutip Oleh Dr. Mukti Fajar ND., Yuilanto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1993.

**Perundang-undangan**

Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

**Jurnal**

[Http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/16372](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16372) *(Kewajiban Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Dihubungkan Dengan Hak-Hak Karyawan/Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)* DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.16372>

**Internet :**

[https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya Pukul 16:30](https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya%20Pukul%2016:30) WIB Tanggal 24/8/2021

[https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17275 11/29/2021 18:18](https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17275%2011/29/2021%2018:18) Wib

1. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya Pukul 16:30](https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya%20Pukul%2016:30) WIB Tanggal 24/8/2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudarsono, *Kamus Hukum*., PT Asdi Mahasatia Jakarta. 201. 2007.hal. 234. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid.hal. 190. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid.hal. 358. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imran Nating, SH. MH, “*Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 2, diambil dari buku Fred B.G. Tumbuan, “*Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU NO.1/1998*” dalam Penyelesaian Utang-piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rudhy A. Lontoh, Ed. (Bandung:Alumni, 2002) Hlm. 125. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Hlm. 35 Dikutip Oleh Dr. Mukti Fajar ND., Yuilanto Achmad, MH., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010. hal. 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. [https://pa-kotamadiun.go.id/images/ngajiBW/Ngaji-bw-4.pdf pukul 9:01](https://pa-kotamadiun.go.id/images/ngajiBW/Ngaji-bw-4.pdf%20pukul%209:01) Wib Tanggal 1-8-2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/perkembangan-benda-dalam-hukum-dan-cara-penyerahannya/#:~:text=Subekti%20membagi%20benda%20dengan%3A%20a,benda%20tidak%20bergerak%5B1%5D>. pukul 09:04 AM tanggal 8-1-2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Jakarta, Kencara, 2010. Hal. 133. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hal. 133. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wirjono prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal 52 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan), Jakarta. Kencana 2009. Hal. 305 [↑](#footnote-ref-12)
13. Imran Natihing, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis ( Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia), Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2012. Hal. 341. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di peradilan, Rawamangun – Jakarta 2009 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. hal [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hal. 3 kutipan dari Kartini Mulyadi (2001), “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut sebagai Kartini Mulyadi 1), h. 168. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di peradilan, Rawamangun – Jakarta 2009 hal. 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Imran Natin, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, PT Rajagrafindo Persada, Kelapa Gading Permai, Jakarta. 20004. Hal. 9 [↑](#footnote-ref-19)
20. Imran nating, Hal. 28 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid hal 29 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid hal 30 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid hal 34 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid hal 34 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, hal 101 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, hal 105 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hal 107 [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://yuridis.id/syarat-syarat-kepailitan-menurut-uu-kepailitan-no-37-tahun-2004-tentang-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> pukul. 21:22 WIB tanggal 07-01-2022 [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/> pukul 21:28 wib tanggal 7-1-2022 [↑](#footnote-ref-29)
30. Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” Edisi Revisi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal 59, Dari Lihat Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, lihat juga Standar Profesi Kurator dan Pengurus, keduanya diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurusan Indonesia.* [↑](#footnote-ref-30)
31. H. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, “Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus (Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus Yang Profesional dan Independen), Sinar Grafika, Jakarta , 2018 Hal 2 [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)* . Pernada Media Grup, Jakarta, 2009 Hal.108 [↑](#footnote-ref-32)
33. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Kepailitan diambil dari M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)* . Pernada Media Grup, Jakarta, 2009 Hal. 379 [↑](#footnote-ref-33)
34. [https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17275 11/29/2021 18:18](https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17275%2011/29/2021%2018:18) Wib [↑](#footnote-ref-34)
35. Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberasan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hal. 70 [↑](#footnote-ref-35)
36. H. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitian Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Pernada Media Grup, Jakarta, 2008. Hal. 108. [↑](#footnote-ref-36)